

Signifikansi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Memaksimalkan Kompetensi Warga Negara

Berchah Pitoewas^{a, 1*}, Muhammad Mona Adha^{a, 2}, Eska Prawisudawati Ulpa^{b, 3}, Rohman^{a, 4},
Ahman Tosy Hartino^{a, 5}, Rhosita^{a, 6}

^a Universitas Lampung, Indonesia

^b Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

¹berchah.pitoewas@fkip.unila.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 November 2021;

Revised: 28 November 2021;

Accepted: 20 Desember 2021.

Kata-kata kunci:

Pendidikan;

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Karakter.

Keywords:

Education;

Citizenship Education;

Character.

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi peran utama dalam pengembangan nilai pengetahuan, nilai karakter, dan nilai moral etika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Hasil penelitian memaparkan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan memuat tentang pembelajaran salah satunya tentang pembentukan karakter peserta ternyata PPKn tidak hanya membahas tentang pengetahuan saja, namun juga adanya pembelajaran tentang karakter dan nilai yang mana tidak dipelajari seluruhnya dimata pelajaran lainnya. Mata pelajaran PPKn sering kali seorang pendidik hanya menekankan pada ranah kognitif siswa saja tanpa menekankan ranah afektif dan psikomotorik sehingga siswa hanya mampu memahami tentang pengetahuan tentang kewarganegaraan. Tetapi, tidak mampu mengimplementasikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu seorang pendidik dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik harus saling seimbang dan selaras agar tujuan dari mata pelajaran kewarganegaraan itu tercapai.

ABSTRACT

The Significance of Civic Education Learning Maximizes Citizen Competence. Citizenship education is one of the subjects that play a major role in the development of knowledge values, character values, and ethical moral values. This research uses qualitative methods, where the study produces information in the form of descriptive notes and data contained in the text studied. The results of the study explained that the civic education material contains about learning one of them about the formation of the character of participants turned out to be VAT not only discussing about knowledge, but also the learning about character and values that were not learned entirely in the eyes of other subjects. PPKn subjects are often an educator only emphasizes the cognitive realm of students only without emphasizing the affective and psychomotor realm so that students are only able to understand about knowledge about citizenship. However, it is not able to implement citizenship in everyday life. Therefore, an educator is required to be able to balance between the cognitive, affective, and psychomotor realms must be balanced and aligned so that the goals of the civic subjects are achieved.

Copyright © 2021 (Berchah Pitoewas, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Pitoewas, B., Adha, M. M., Ulpa, E. P., Rohman, R., Hartino, A. T., & Rhosita, R. (2021). Signifikansi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Memaksimalkan Kompetensi Warga Negara. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 437–446. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.508>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara majemuk yang dimana di dalamnya terdapat berbagai suku, ras, budaya, agama dan bahasa. Hal tersebut yang harus kita syukuri karena banyak negara-negara lain yang menginginkan seperti negara Indonesia, walaupun banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia namun dengan adanya keberagaman ini akan memunculkan suatu persatuan dan warga negara Indonesia tetap hidup damai secara berdampingan sesuai dengan salah satu dari empat pilar yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang dijadikan sebagai semboyan Negara Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan keberagaman baik dari etnis, bahasa daerah, adat-istiadat, kebiasaan yang bersifat pluralistik (Kusumohamidjojo, 2000).

Aspek multi agama, multi etnis, multi budaya, merupakan potensi yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam kehidupan yang pluralistik. Selain kita harus bangga terhadap keberagaman yang ada, kita juga memiliki tantangan dan ancaman yang besar dari pihak luar contohnya seperti Malaysia yang mengklaim kesenian Wayang Kulit sebagai budaya mereka. Salah satu yang memicu hal ini karena beberapa orang Indonesia yang menetap disana kerap mengadakan pertunjukan Wayang Kulit, namun hal itu dibantah oleh UNESCO pada tanggal 27 November 2003 Wayang Kulit ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Nasikun (2007) yang menyebutkan bahwa keragaman masyarakat multicultural sebagai kekayaan bangsa disisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau yang mana menjadi ciri tersendiri dibanding negara lain. Dari banyaknya pulau yang ada di Indonesia di dalamnya pun juga terdapat banyak sekali berbagai keragaman suku, ras, budaya, dan bisa dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara Pluralisme dan Heterogenitas tetapi tetap diikat dengan adanya prinsip kesatuan dan persatuan bangsa yang terdapat dalam semboyan *Bhinneka tunggal Ika* (Adha, 2015; Adha, 2019; Adha et al., 2019). Seperti diibaratkan dua mata koin yang berbeda, disisi mempunyai kelebihan akan keberagaman yang ada, namun juga tidak jarang kita temui banyak sekali permasalahan yang menyangkut tentang budaya yang pluralisme. Indonesia pada saat ini banyak sekali dihadapkan dengan konflik Suku yang mana banyak kita jumpai diberbagai daerah yang ada di Indonesia.

Hal yang tidak mudah dalam menyatukan suatu keberagaman yang sangatlah banyak di negara ini. Tentu saja hal ini didukung oleh kesadaran dari warga negaranya. Warga negara berperan penting dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila (Adha, 2020), karena subyek dalam negara itu sendiri adalah warga negaranya. Hal ini berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hardiman (2002) yang menjelaskan bahwa Indonesia ini sedemikian kompleksnya, sehingga sulit melukisnya anatominya secara persis. Hal tersebut dapat dilihat dari Masyarakat Indonesia yang mana didalamnya tidak hanya ada satu suku, namun banyak sekali suku yang terdapat di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dengan adanya keberagaman ini, ternyata menjadi faktor adanya konflik yang terjadi di Indonesia. Sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah air, tentu kita harus bisa mempertahankan persatuan dan keutuhan kebudayaan bangsa Indonesia dengan cara menumbuhkan kesadaran dari warga negaranya dan harus memiliki rasa toleransi yang tinggi yang mana mencerminkan dasar negara Indonesia yangberlandaskan Pancasila, yang mana didalam Pancasila sudah diatur semua dari sila pertama sampai dengan sila kelima, yang mencerminkan ciri khas dari negara Indonesia. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang ada di Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara manapun.

Menumbuhkan kesadaran dan toleransi itu tidaklah mudah, oleh sebab itu, di sinilah peran sebuah pendidikan mengajarkan bagaimana seharusnya warga negara menjadi warga negara yang seutuhnya dan sesuai serta menjalankan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dilaksanakan. Seperti halnya pemerintah sudah memberikan program belajar wajib 12 Tahun. Hal tersebut tentu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, dari yang awal hanya diwajibkan 9 tahun kemudian meningkat menjadi 12 tahun.

Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Di dalam pendidikan formal di sekolah khususnya, ada mata pelajaran yang mana memuat tentang bagaimana hubungan warga negara dan negara yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa mata pelajaran ini sudah kita pelajari sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, tentu hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari terkhusus untuk generasi muda untuk membangun karakter generasi muda supaya para generasi muda memiliki jiwa yang nasionalis atau cinta tanah air. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini generasi muda diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat membangun negeri sesuai dengan nilai-nilai yang terdandung didalam pancasila. Selain itu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini membantu untuk menyadarkan serta meliterasi seluruh masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam bernegara.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya peserta didik kita ini masih minim sekali literasi serta pengetahuan tentang apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang benar. Untuk itu, PPKn ini untuk menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan warga negara dan negara, dan di dalam materi PPKn didalamnya juga terdapat membahas tentang bagaimana sejarah perumusan dasar negara serta mempelajari dan mengetahui tentang pidato teks proklamasi, artinya dalam hal ini PPKn juga memuat dari mata pelajaran lain seperti halnya sejarah, tentang bagaimana sejarah adanya Pancasila. Hal ini bersamaan dengan pendapat Somantri (1969) yang menjelaskan pada saat itu mata pelajaran *Civics* atau kewarganegaraan pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklasi hak asasi manusia, dan pengetahuan perserikatan bangsa-bangsa. Dan di dalam PPKn ada 3 ranah kompetensi guna untuk menyikapi kemajemukan negara Indonesia yang majemuk. Dari tiga ranah tersebut yaitu ada pengetahuan kewarganegaraan, kecakapan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan (Branson et al.,1998).

Mata pelajaran PPKn sangat menyolok dengan misi mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara kesatuan dan persatuan, tidak memaksakan pendapat, menghargai, dan lain-lain yang dirasionalisasikan demi kepentingan pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional ini, hal ini dikemukakan oleh (Winarno, 2006: 24) Mata pelajaran PPKn merupakan sebuah mata pelajaran yang dipelajari disetiap jenjang pendidikan formal, yang mana tentu saja kita sudah tau bahwa PPKn merupakan mata pelajaran wajib dari seluruh tingkat pendidikan formal, untuk itu mata pelajaran ini merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk dipelajari oleh warga negara (Gultom, 2020).

Priyatna (2016) menyatakan bahwa karakter adalah sifat, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pengertian moral adalah istilah manusia menyebut kemanusiaan atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Moral secara umum adalah sebuah hukum tingkah laku yang diterapkan oleh masing-masing individu untuk dapat melakukan sosialisasi dengan benar antara sesama makhluk sosial agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Pendidikan karakter dan moral sangat dibutuhkan untuk pembangunan karakter bangsa. Gerakan pembangunan karakter bangsa harus mendapatkan dukungan dari seluruh komponen (Setiawan, 2013).

Menurut Syahri (2013) menyatakan bahwa patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya hal ini dapat diartikan sebagai rasa positif yang terdapat pada diri seseorang terhadap sikap kepada negaranya, tentunya dalam hal ini definisi patriotisme ternyata sama halnya yang diungkapkan oleh tokoh yang menyatakan bahwa Patriotisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme dan sekelompok manusia yang menghuni bumi Indonesia wajib

bersatu, mencintai dengan sungguh-sungguh dan rela berkorban membela tanah air Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Penelitian kualitatif ini bersifat studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Metode studi literatur ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sementara itu proses analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan kewarganegaraan (*civics* atau *civic education*) sangat berkaitan dengan aspek kewarganegaraan selaku individu yang memiliki peran, hak, dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Konsep hak-hak tanggung jawab dan tugas sebagai warganegara terkait pula dengan suatu pola hubungan dan timbal balik antara pemerintah dan yang diperintah dan keduanya diikat oleh peraturan hukum dan undang-undang yang harus dipatuhi. Aspek publik dan privat sebagai warga negara diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan dimaknai sebagai pedoman berinteraksi antar individu satu dengan yang lain.

Pendidikan Kewarganegaraan mengalami beberapa pergantian nama beberapa kali. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia pada awalnya dikenal dengan Civics namun secara formal tidak dijumpai dalam kurikulum tahun 1957 maupun kurikulum tahun 1946. Secara materiel dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukan pengetahuan mengenai pemerintah (Winataputra, 2012). Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan individu untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas dengan akhlak yang terpuji. PPKn juga mengajarkan tentang kerangka Negara Republik Indonesia, lalu mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila dan memperkuat wujud cinta terhadap tanah air (Prakoso, 2017; Sutrisno, 2017).

Misi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah menciptakan kompetensi warga negara yang baik supaya mampu berperan aktif dan bertanggung jawab untuk kelangsungan pemerintahan secara demokratis melalui pengembangan pengetahuan, ketrampilan. Visi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat demokratis. Konsep dan materi nilai-nilai patriotisme, kesadaran dari setiap warga negara, partisipasi warga negara, hak dan kewajiban, merupakan kebutuhan untuk dipelajari dan dipahami sebagai identitas pada konsep kesatuan, sehingga pembelajaran PPKn sangat mempunyai peran penting dalam pembentukan identitas terhadap warga negara bagi suatu bangsa (Kerr, 1999). Di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan dan menumbuhkan serta meningkatkan rasa kebangsaan dan nasionalisme kepada seluruh peserta didik, serta seluruh masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang mencintai dan berkorban untuk tanah air (Maftuh, 2008), serta hubungan masyarakat antara bangsa di dunia (Saripudin, 2011).

Tergambarkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membina warga negara Indonesia agar dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai anggota dari warganegara terhadap kehidupan yang berbangsa dan bernegara dalam konsep NKRI dengan memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, dengan tetap memelihara dan mempertahankan ciri-ciri bangsa dan latar belakang budaya bangsa (Rasyid, 2004). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam sikap membangun karakter tentu diharuskan untuk saling terbuka antar warga negara dan menanamkan rasa sikap peduli terhadap sesama sekaligus menumbuhkembangkan pola pikir, sikap dan

perilaku rukun, damai serta toleran dengan memupuk kebhinnekaan bangsa Indonesia (Hermanto, 2013).

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdapat beragam suku, agama, ras, yang membuat berbeda dengan negara lain, maka dari itu dibutuhkan pendidikan multikultural untuk memperkuat identitas nasional yang dapat disampaikan melalui pembelajaran PPKn. Sumber daya manusia Indonesia selaku warga negara yang tangguh dan cerdas, mampu memiliki daya saing yang dibarengi oleh akhlak dan karakter yang baik terutama di era modern atau globalisasi saat ini. Pendidikan Kewarganegaraan dipelajari dalam setiap jenjang pendidikan formal, yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik serta patuh terhadap peraturan hukum, memahami karakter, nilai, dan moral. Warga negara berperilaku sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku kemudian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tumbuh sebagai warga negara dengan integritas diri yang kuat (Ihsan, 2017; Muhibbin, 2016).

Warga negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan agar bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik, hal-hal berkaitan dengan kepentingan umum dan aspek-aspek lain (Vontz, 2000: 36). Suatu kaidah-kaidah dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam pengetahuan menjadi krusial untuk dikembangkan dan diimplementasikan agar warga negara mampu memiliki keilmuan yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat. Pengetahuan kewarganegaraan merupakan pedoman di dalam bertindak serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan kewarganegaraan tidak hanya sebatas aspek hak dan kewajiban saja tetapi meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia untuk bagaimana warga negara mempunyai Langkah strategis di dalam *problem solving* di lingkungan masyarakat. Pengetahuan kewarganegaraan harus mencakup materi yang bertujuan untuk mendidik warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan untuk dapat memahami akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan tidak hanya terbatas dalam jenjang pendidikan formal saja, namun sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari pendidikan kewarganegaraan secara tidak langsung belajar tentang konsep politik, hukum, dan moral yang menyangkut tentang kemampuan akademik (Suwama, 2002).

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya melahirkan warga negara yang cerdas, tetapi juga mampu memperkuat setiap individu tau peserta didik mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan ini memiliki tujuan dan fungsi yang erat kaitannya dengan menjadikan warga negara Indonesia yang paham serta mengerti tentang apa saja hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara yang baik. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Selain itu setelah kita mengetahui pendidikan kewarganegaraan seseorang diharapkan memiliki sikap nasionalis yang dimana mampu mempertahankan Negara Republik Indonesia serta melestarikan budaya budaya bangsa Indonesia agar tidak hilang dan dapat diwariskan.

Menurut Depdiknas 2010 dalam (Gunawan, 2012:2) karakter artinya memiliki karakter, memiliki kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Individu dapat dikatakan memiliki karakter yang baik atau unggul adalah individu yang berusaha dalam hidupnya melakukan hal-hal yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara. Individu dikatakan memiliki karakter yang baik apabila individu tersebut mampu mengontrol dirinya sendiri dan dapat menilai bagaimana kemampuan yang ada dalam dirinya, sehingga ia melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dirinya.

Karakter itu sendiri memiliki fungsi yang sangat penting dalam melihat kehidupan di masa depan seseorang, karena sikap atau tingkah laku seseorang baik atau buruknya dapat mencerminkan

orang tersebut dinilai baik atau tidak dalam berbangsa dan bernegara. Solusi terkait permasalahan-permasalahan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan, karena pendidikan memegang peran paling penting dan efisien dalam usaha pembentukan karakter yang baik pada generasi muda saat ini. Pendidikan itu sendiri menurut UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) dalam disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang menyangkut tentang kepribadian spiritual, sosial dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan karakter sebagai salah satu cara untuk mendorong peserta didik dalam tumbuh dan berkembang dengan kompetensi berfikir dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam hidupnya yang mempunyai keberanian melakukan yang benar, meskipun dihadapkan dengan tantangan yang ada dan yang akan dihadapi (Zubaedi, 2012).

Karakter suatu bangsa dapat dicerminkan oleh karakter serta moral dari masyarakatnya yang diperkuat melalui pendidikan. Pembelajaran tentang pembentukan karakter serta moral yang baik dapat dilakukan di dalam kelas di satuan pendidikan ataupun pada lingkungan non pendidikan ataupun pendidikan. Pembentukan karakter dan moral yang baik di dalam kelas salah satu caranya adalah melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Peranan lembaga pendidikan guna membentuk karakter moral pada anak merupakan hal yang fundamental mengingat bahwasanya lingkungan tempat sang anak dibesarkan sangat memengaruhi tingkat kecerdasan moral anak (Desti, 2017; Dianti, 2014).

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 3 dalam tim redaksi yang menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat penting bahwasanya yang kita ketahui pembelajaran PPKn adalah pembelajaran yang muatan dari mata pelajaran tersebut adalah nilai-nilai karakter.

Pembelajaran yang memperhatikan komponen afektif perlu mendapat perhatian, sehingga tidak berfokus pada kognitif saja. Pembelajaran yang bersifat student center patut diutamakan untuk lebih berorientasi pada kemampuan siswa di dalam mengolah informasi, dan menjadikan siswa lebih aktif di dalam kelas (Budimansyah, 2012). Proses pembelajaran PPKn harus dikembangkan dengan mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi karena penanaman nilai-nilai karakter tidak bisa hanya sekedar diajarkan akan tetapi juga harus dikembangkan atau dipraktikkan. Pendidik diharapkan mampu mengembangkan dan menyeimbangkan antara tiga ranah pengetahuan yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik, agar pendidikan PPKn diakhirnya mampu menghasilkan anak-anak yang cerdas dan memiliki karakter yang baik.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Komalasari, 2010). Pada sejatinya misi yang diemban atau dipegang pendidikan kewarganegaraan sudah banyak yang tercapai, yang kita tahu saat ini bahwasanya banyak generasi muda yang berkarakter baik sesuai yang dicita-citakan negara Indonesia. Peran pendidik dalam mata pelajaran PPKn dan pola asuh orang tua dalam tindakan moral peserta didik berguna untuk membentuk tindakan moral seorang anak yang baik karena pada sejatinya pendidikan kewarganegaraan mengajarkan tentang pembentukan karakter pada peserta didik serta mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Lalu peran orang tua saat mengembangkan pola berfikir anak serta moral anak yang mana pola asuhnya otoritatif sebab dianggap memiliki efek sangat bagus dalam mengembangkan moral remaja. Untuk membentuk peserta didik yang memiliki sikap nasionalisme maka guru dan orang tua harus bisa membentuk moral yang baik pada anak tersebut (Marzuki, 2016).

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru sebelum melakukan pembelajaran harus merancang RPP terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat mendukung penanaman nilai-nilai karakter. Terdapat dua fungsi RPP dalam menyukseskan pendidikan karakter di sekolah yaitu: fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan (Mulyasa, 2013). Apabila RPP yang sudah dibuat seorang

guru sudah tersusun rapi dan sesuai dengan indikator yang diajarkan diharapkan proses pembelajaran tidak lagi membosankan dan mata pelajaran kewarganegaraan menjadi lebih berkembang (*open classroom climate*). Proses pembelajaran yang aktif juga dapat dilihat bagaimana respon siswa di dalam proses pembelajaran, siswa aktif dalam menyampaikan pendapat mengenai materi yang diajarkan oleh guru. Mengajak keterlibatan siswa di dalam kelas atau pembelajaran dapat dilakukan dengan membaca materi baik dari buku, koran atau internet, berdiskusi dengan teman, beropini berdasarkan topik, melakukan demonstrasi atau bermain peran, dan lain-lain.

Pendidikan kewarganegaraan suatu proses membentuk watak serta peradaban bangsa yang memiliki tujuan negara sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta menjadikan semua warga negara Indonesia menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat pemerintah. Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran warga negara di dalam memperkuat solidaritas dan harmoni di lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang memiliki status sosial baik, melainkan untuk semua orang (seluruh masyarakat) karena sesungguhnya kemajuan suatu bangsa merupakan tanggung jawab semua warganya. (Koesoema, 2007; Rohayani, 2008). Warga negara yang baik adalah warganegara yang menaati norma-norma yang berlaku serta metaati peraturan-peraturan yang di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membenahi dan membentuk karakter serta melahirkan generasi muda yang cerdas dan memiliki karakter yang baik sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat. Contoh kecil yang harus dikembangkan yaitu sikap toleransi yang tinggi melihat bahwa negara Indonesia merupakan negara majemuk dan warga negara diharapkan menyikapi segala perbedaan yang ada dengan sebuah perdamaian.

Nilai itu merupakan sesuatu yang berharga bahkan dianggap sebagai bernilai, adil, baik, dan indah serta menjadi pedoman dan pegangan diri kita menjadi acuan dan atas keyakinan diri sendiri. Sedangkan moral adalah suatu kebiasaan atau tata cara hidup menunjukkan pada perilaku kita yang diharapkan. Adat atau tata cara hidup bermoral menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktik sekelompok manusia, moral, dipakai untuk perbuatan yang dinilai, moral juga lebih meneliti beratkan pada perbuatan manusia itu sendiri (Rohman 2006:23). Kata-kata moral itu sendiri berasal dari mos untuk kebiasaan yakni kebiasaan yang bersifat fundamentalis, berakar pada sesuatu yang lekat pada kodrat manusia seperti mengatakan kebenaran, menghormati orang tua (Poespoprodjo 1988). Jadi artinya bahwasanya kebiasaan tersebut bukan sekedar kebiasaan adat semata, melainkan suatu perbuatan yang benar-benar terjadi. Moral bukan sekedar apa yang biasa dilakukan orang atau sekelompok orang, melainkan apa-apa yang tidak baik dan apa-apa yang baik dalam mengenai apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan. Jadi dapat di artikan bahwasanya bahwa nilai moral itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan normalogika etika, estetika dan agama yang berdimensi personal, sosial, kebangsaan, kemanusiaan dan ketuhanan yang terpatrit. Bahkan pancasila itu juga salah satu sebagai norma-norma acuan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia yang memiliki target sangat luas yakni pengalaman nilai-nilai moral dengan penuh keyakinan dan nalar, target umum serta menyeluruh itu membawa misi dalam menanamkan nilai moral pancasila di dalam sekolah.

Yang pertama menanamkan nilai moral pancasila yang dimana disini peserta didik menjadi jadi diri sehingga menjadi sebuah pola atau landasan berpikir akan pentingnya sebuah nilai moral pancasila tersebut bahkan meresap kedalam kalbu, keyakinan yang akan melahirkan kesiapan untuk berperilaku yang sesuai dengan moral-moral pancasila. Yang kedua yakni membina generasi untuk memahami dan mampu turut serta dalam sebuah kehidupan dimasyarakat. Yang ketiga yaitu untuk mengupayaka hal tersebut perly meningkatkan kemampuan belajar dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang dimana didalam pembelajaran tersebut disisipkan sebuah pembelajaran tentang nilai moral

terhadap peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya dalam menanamkan sebuah tentang pemahaman nilai moral dalam proses perencanaan pengajaran, serta memberikan dorongan kepada peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar serta dapat memperbaiki sifat dan perilaku peserta didik tersebut.

Nilai moral yang dimana siswa ketika diberikan arahan serta dorongan untuk belajar secara teratur sudah cukup baik ini terlihat dari antusiasnya siswa dalam belajar khususnya pada materi demokrasi ini dimana siswa rajin bertanya dan menjawab pertanyaan yang di berikan, serta dalam beraktifitas dikelas yang dimana siswa berperilaku dengan baik sesuai nilai moral yang di tanamkan kepada siswa. Guru pendidikan kewarganegaraan juag selalu menanamkan sebuah nilai-nilai moral didalam yang dimana dilakukannya setiap hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran guru khususnya pendidikan kewarganegaraan memberikan pelaksanaan pengajaran tentang pengembangan nilai moral kepada siswa dalam pembinaan perilaku yang baik untuk peserta didiknya. Guru memiliki tanggung jawab secara moral untuk mengarahkan dan membantu peserta didik berperilaku baik, melindungi mereka dari hal-hal yang akan merusak kepribadiannya. Perilaku itu seperti melanggar etika di jalan raya, tidak peduli dengan lingkungan sosial, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas pada orang yang lebih tua, berkata-kata kasar pada sesama teman, membantah pada orang tua, guru dan pendidik. Pelanggaran-pelanggaran etika sopan santun seperti ini, dipandang sebagai perwujudan rendahnya sikap sopan santun para pemuda dan anak remaja.

Etika sangat erat dengan pendidikan karena masing-masing memiliki pokok pemahaman yang berbeda-beda, karena etika menyangkut tentang kebiasaan atau mengenai sikap baik buruk seseorang. Sedangkan dalam pendidikan menyangkut dalam sebuah proses yang tentu saja terus-menerus dan berlangsung dalam kehidupan seseorang, kemudian yang mengacu pada suatu tujuan itu sendiri ingin menanamkan nilai-nilai yang baik serta luhur dan pantas untuk kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan pendapat ahli yang mengatakan bahwa suatu tindakan pendidikan atau lebih tepatnya suatu pertemuan pendidikan merupakan suatu tindakan rasional etis. Hal ini membedakan antara manusia dengan binatang yang tindakannya selalu berdasarkan insting dan bukan berdasarkan suatu pertimbangan yang rasional serta disadarkan menggunakan etika. Manusia hidup tentunya untuk kebaikan karena itu pertimbangan etis harus ditunjukkan pada suatu perbuatan manusia sebagai makhluk yang baik dan memiliki akal. Ini yang disebut sebagai manusia makhluk rasional etis (Tilaar, 2009).

Nilai etika dan moral ini pada akhirnya akan mengacu kepada suatu prespektif dan pemahaman yang menuntun agar para peserta didik ini memiliki suatu kebiasaan dan sikap yang baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dengan adanya etika serta moral ini di harapkan agar peserta didik dapat menjadi seorang manusia yang beradab dan berkarakter budi luhur sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh masyarakat. Sehingga kelak saat peserta didik terjun kedalam masyarakat dapat membaur dan diterima dalam kehidupan yang mana diharapkan akan menciptakan suatu kondisi yang aman, tentram dan sejahtera jauh dari suatu konflik di masyarakat.

Simpulan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang sangat penting diterapkan pada pendidikan formal, karena dalam pembelajaran ini tidak hanya menyangkut tentang Pengetahuan saja, namun juga belajar bagaimana berperilaku dengan baik kemudian bagaimana cara menerapkan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat, hal ini tentu dirasa sangat penting terlebih untuk generasi muda saat ini, karena dengan pembelajaran ini tentu saja bisa dijadikan sebuah solusi tentang bagaimana menjaga keutuhan dan memupuk rasa persatuan dan cinta tanah air kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Untuk itu sebagai generasi penerus bangsa kita harus bisa mempelajari PPKn dengan sungguh-sungguh

karena didalamnya terkandung hal-hal yang sangat penting dan dijadikan pedoman bagaimana menjadi warga negara yang baik yang patuh terhadap nilai-nilai luhur Pancasila.

Referensi

- Adha, M. M., Ulpa, E. P., Johnstone, J. M., Cook, B. L. (2019). Pendidikan Moral Pada Aktivitas Kesukarelaan Warga Negara Muda (Koherensi Sikap Kepedulian dan Kerjasama Individu). *Journal of Moral and Civic Education*, 3(1).
- Adha, M.M. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan Mengoptimalkan Pemahaman Perbedaan Budaya Warga Masyarakat Indonesia Dalam Kajian Manifestasi Pluralisme Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 1-10.
- Adha, M.M. (2019). Advantegous of Volunteerism Values for Indonesian Community and Neighbourhoods. *International Journal of Community Service Learning*, 3(2), 83-100.
- Adha, M.M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138
- Ahmad. (2013). Arus Pemikiran Islam Dan Sosial Menghalau Peradikalisme Kaum Muda, Gagasan Dan Aksi. Vol 8 No. 1. Hal 4-6
- Bertens, K. (1993). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Branson, M.S., Quigley, C.N. (1998). *The Role Of Civic Education*. Washinton DC.
- Budimansyah, D. (2012). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Widya Aksara Press: Bandung.
- Cholisin. (2011). *Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran PKn*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Darmodiharjo, Darji. (1988). *Pendidikan Pancasila*. Surabaya: IKIP Malang.
- Desti, T. (2017). *Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Karakter Kebangsaan Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi*. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan. Hal 128-129.
- Dianti, P. (2014). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mengebangkan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 23, No 1. Hal 60-61.
- Gultom, Andri, "Filsafat, Corona, dan Kepanikan Kita 1," Researchgate, 2020<https://www.researchgate.net/publication/340091676_Filsafat_Corona_dan_Kepanikan_Kita>
- Gunawan, H. (2012). *Pendidikan Karakter (Konsep dan Implementasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Hardiman, F.B. (2002). *Kewargaan Multikultur Teori Liberal Mengenal Hak-Hak Minoritas*. Jakarta: LP3ES.
- Hermanto. (2013). *Pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran PKn sebagai penguatan karakter bangsa. Studi evaluasi dan pengembangan pembelajaran bermodel pakem di sekolah menengah pertama*. Disertasi: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ihsan. (2017). Kecenderungan Global Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2 No, Juli 2017. Hal 52-53.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. London: Quality Curriculum Asociation.
- Koesoema, D. (2007). *Pendidikan Karakter*. Jakarta; PT Grasindo.
- Komalasari, K. (2010). *Pembelajaran Kontekstual (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Gasindo.
- Lickona, T. (2012). *Character Maters*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Vol 11 No 2. Hal 135-136.
- Marzuki. (2016). Pengaruh Peran Guru PPKn dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tindakan Moral Siswa. *Jurnal Kependidikan*. Vol 46 No 2. Hal 195

- Muhibbin, A. (2016). Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Isu-Isu Kontroversial di Media Massa untuk Meningkatkan Sikap Demokrasi Mahasiswa dan Implikasinya Bagi Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 26 No 1. Hal 4-5
- Mulyasa. (2013). Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poespoprodjo, W. (1988). *Filsafat moral kesusilaan dalam teori dan paktek*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Prakoso, R. (2017). Pengaruh Pembelajaran E-Learning Terhadap Motivasi Belajar PKn Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Gandekan No. 230, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. *Jurnal PPKn*. Vol. 5 No.1, Januari 2017. Hal 1017-1018
- Priyatna, M. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 05, Juli 2016. Hal 1316-1317
- Rasyid, R. (2004). *Desentralisasi dalam Rangka Menjunjung Pembelajaran Daerah*. Jakarta: LP3ES.
- Rohayani, I. (2008). Pengaruh Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Interventif Terhadap Karakter Warga Negara Muda.
- Rohman. (2006). *Causes Based Learning Sebagai Upaya Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas VII Dismp Negeri 1 Kudus*. Skripsi Semarang: Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri.
- Saripudin, S. (2011). Dinamika Konseptualisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Pendidikan*. Vol.12 No 1, Maret 2011. Hal 12-13
- Setiawan, D. (2013). Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral. *Jurnal Pendidikan Karakter*. Tahun III, No 1, Hal 54.
- Somantri, N. (1969). *Pelajaran Kewargaan Negara disekolah*. Bandung: IKIP Bandung.
- Sutrisno. (2017). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 6 No1, April 2018. Hal 18-19
- Suwarma, A.M. (2000). *Pengembangan Kemampuan Berpikir Dan Nilai Dalam Pendidikan IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri Bandung.
- Syahri. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Malang: UMM Press.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003.
- Vontz, T. (2000). *We Project Citizens*. Washington: USAID.
- Winarno, B. (2006). Sistem politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winataputra, Udin S. (2012). *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Zubaedi. (2012). *Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Pendidikan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.